

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Wisnu Harbiyanto¹, Kartika Hendra Ts², Istiatin³

^{1,2,3*} Program Magister Manajemen Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia
E-mail: wisnu.harby@gmail.com¹⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Kinerja keuangan diprosikan dengan rasio ketergantungan keuangan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan di kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan menggunakan data sekunder berupa data realisasi APBD tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji empat hipotesis. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa rasio belanja pegawai, rasio belanja barang dan jasa, rasio belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan rasio PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun kontribusi pengaruh semua variabel independen tersebut terhadap belanja modal sebagai variabel dependen adalah sebesar 76.7%, sedangkan 23.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kinerja Keuangan.

Abstract

This research aims to determine the influence of personnel expenditure, goods and services expenditure, capital expenditure, and Regional Original Income (PAD) on the financial performance of district and city governments in Central Java Province. Financial performance is proxied by the regional financial dependency ratio. This type of research is quantitative research. The research was conducted in districts/cities in Central Java using secondary data in the form of APBD realization data from 2019 to 2023. The data analysis technique used multiple linear regression which was used to test four hypotheses. The results of this research provide empirical evidence that the employee expenditure ratio, goods and services expenditure ratio, capital expenditure ratio have no effect on financial performance, while the PAD ratio has an effect on financial performance. However, the contribution of the influence of all these independent variables to capital expenditure as the dependent variable is 76.7%, while 23.3% is influenced by other variables not examined in this research.

Keywords: *Employee Expenditures, Expenditures on Goods and Services, Capital Expenditures, Original Regional Income, Financial Performance.*



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah telah dilaksanakan selama lebih dari 20 tahun. Otonomi daerah dimulai sejak adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Adanya Undang-Undang tersebut mengubah sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem terpusat atau sentralisasi menjadi sistem desentralisasi atau otonomi daerah (Priyono, dkk 2020).

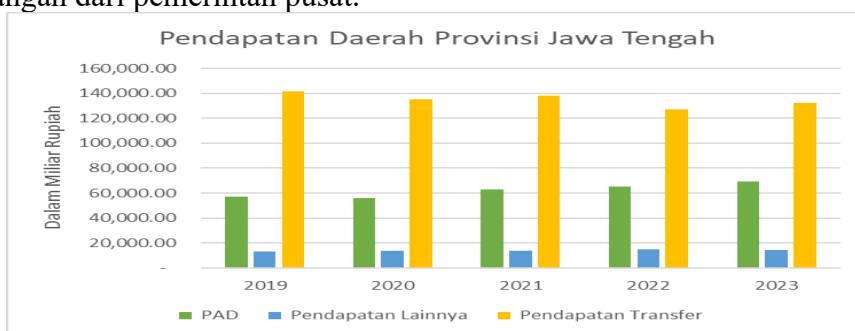
Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat dan menjadi proses penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengelola, dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan begitu, suatu daerah secara perlahan dan bertahap

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

berusaha untuk menjadi daerah yang mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat.

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah serta kemampuan mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan berbagai rasio, seperti rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio ketergantungan, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas.

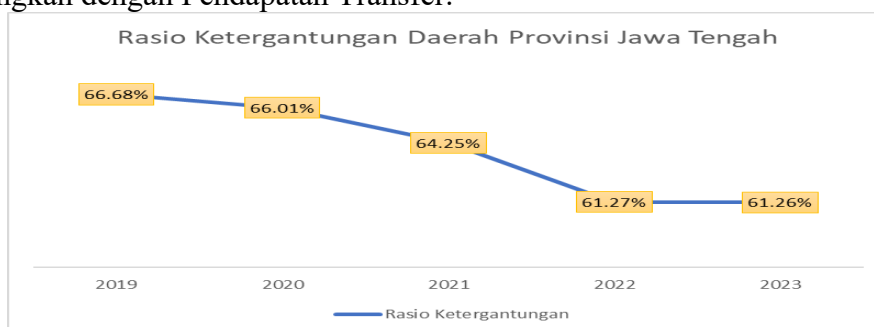
Rasio-rasio pengukuran kinerja keuangan ini dapat memberikan informasi mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional dan pembangunan, mengejar target pendapatan, mengoptimalkan penggunaan anggaran, mengelola utang, dan menanggulangi risiko keuangan. Salah satu indikator kinerja keuangan yang baik tercermin dari rasio ketergantungan yang rendah, yang menunjukkan bahwa daerah mampu membiayai sendiri kebutuhannya tanpa terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.



Gambar 1 Pendapatan Transfer, PAD dan Pendapatan Lainnya di Provinsi Jawa Tengah 2019-2023

Sumber <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>, 2024

Gambar 1 menunjukkan total Pendapatan Transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Lainnya di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 sampai 2023. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa Pendapatan Transfer mendominasi dari tahun ke tahun, sedangkan PAD dan Pendapatan Lainnya memiliki proporsi lebih kecil jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer.



Gambar 2 Tren Rasio Ketergantungan Daerah di Provinsi Jawa Tengah 2019-2023

Sumber <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>, 2024

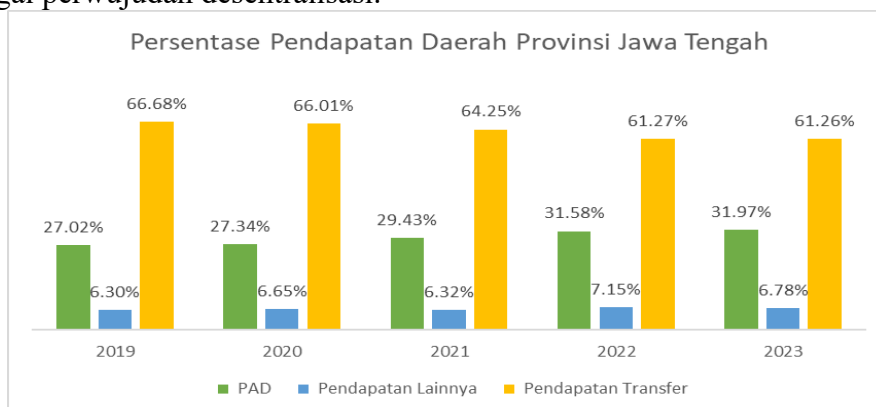
Gambar 2 menunjukkan persentase pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah sebesar 63.89% dari tahun 2019 sampai dengan tahun

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

2023. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum mampu membiayai sendiri kegiatannya dan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

Belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merujuk pada semua pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah dan mengurangi ekuitas dana tunai dalam satu tahun anggaran, yang merupakan kewajiban daerah. Pengeluaran ini digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berada di bawah kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, termasuk tugas-tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah diklasifikasikan dalam 4 (empat) jenis, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.



Gambar 3 Persentase Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah 2019-2023

Sumber <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>, 2024

Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah menyumbang rata-rata 29.47% dari total pendapatan daerah, lebih rendah dibanding dana transfer dari Pemerintah Pusat. Secara nominal nilai PAD mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar Rp 57.29 triliun menjadi Rp 69.17 triliun pada tahun 2023 atau 20.74%. Data tersebut menunjukkan bahwa peranan PAD di Provinsi Jawa Tengah cukup strategis dalam mendukung program desentralisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang dalam rangka membiayai program pemerintah dengan mengurangi ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat. Dengan meningkatnya PAD dapat mengurangi persentase ketergantungan terhadap pendapatan transfer daerah.

Pada penelitian Aulia & Sari (2023) dan Fitriyah (2019) menunjukkann hasil bahwa belanja pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil sebaliknya

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

ditunjukkan oleh Khrisnadewi & Praptiestini (2022) bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dyna *et al* (2022) menunjukkan hasil bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian Fitriyah (2019) menunjukkan sebaliknya bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut hasil penelitian Dyna *et al* (2022) dan Rohmah *et al* (2021) menunjukkan belanja barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pada penelitian Khrisnadewi & Praptiestini (2022), Fitriyah (2019), Anggi *et al* (2022), Dyna *et al* (2022), Rohmah *et al* (2021), Heryanti *et al* (2021), Maulina *et al* (2021), Sari & Mustanda (2019), Prastiwi & Aji (2020), Digdowiseiso *et al* (2022), Sari & Mustanda (2019) menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya pada penelitian Nauw & Riharjo (2021) menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dalam penelitian Alpi & Ammy (2021) belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan Khrisnadewi & Praptiestini (2022), Heryanti *et al* (2021), Maulina *et al* (2021), Sari & Mustanda (2019), Nauw & Riharjo (2021), Prastiwi & Aji (2020), Natalia & Suprpto (2023), Digdowiseiso *et al* (2022), Atmoko & Khairudin (2022), Bilqis & Priyono (2023), Sari & K Mustanda (2019) menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya pada penelitian Aulia & Sari (2023) menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menguji kembali pengaruh belanja daerah yang dinilai dalam rasio belanja pegawai, rasio belanja barang dan jasa, rasio belanja modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diproksikan dengan rasio ketergantungan. Penelitian ini dilakukan pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2019-2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji hipotesis atas suatu pengaruh atau hubungan antar variabel dengan statistik deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi (deskriptif korelasional). Teknik ini dilakukan untuk menganalisa hubungan antara empat variabel bebas yakni rasio belanja pegawai (X1), rasio belanja barang dan jasa (X2), rasio belanja modal (X3), dan Pendapatan Asli Daerah (X4) terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio ketergantungan (Y).

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2019-2023 yang terdiri dari 35 kabupaten/ kota. Tahun data penelitian yang digunakan adalah tahun data 2019 sampai dengan tahun data 2023. Peneliti menjadikan seluruh kabupaten tersebut sebagai sampel (total sampling) yaitu seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menjadikan seluruh populasi tersebut sebagai sampel (total sampling) yaitu seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah kabupaten	29
Jumlah kota	6
Data realisasi belanja daerah	35
Data realisasi PAD	35
Total sampel	35
Total Observasi (35 x 5)	175

Metode analisis pengolahan data pada penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression) untuk menguji hipotesis. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Ketergantungan Daerah
- a = Konstanta
- b = Koefisien determinasi
- X1 = Rasio belanja pegawai
- X2 = Rasio belanja barang dan jasa
- X3 = Rasio belanja modal
- X4 = Rasio PAD
- e = *Error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Regresi

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

	Unstandardized Coefficients B
1 (Constant)	.989
Rasio Belanja Pegawai	-.096
Rasio Belanja Barang dan Jasa	.047
Rasio Belanja Modal	-.055
Rasio PAD	-.922

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan: Rasio Ketergantungan

Sumber : Hasil Analisa Regresi, Lampiran 11.s

Berdasarkan tabel 1 dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.989 - 0.096X_1 + 0.047X_2 - 0.055X_3 - 0.922X_4$$

Persamaan model regresi tersebut dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (mutlak) sebesar 0.989 yang artinya variabel independen rasio belanja pegawai, rasio belanja barang dan jasa, rasio belanja modal dan rasio PAD dianggap

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

konstan sama dengan 0 maka kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio ketergantungan keuangan adalah 0.989 dengan asumsi variabel lain tetap.

- 2) Nilai rasio belanja pegawai sebesar -0.096, maka setiap rasio belanja pegawai dinaikkan 1 satuan, kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio ketergantungan keuangan akan turun sebesar 0.096 (naik -0.096) dengan asumsi variabel lain tetap.
- 3) Nilai rasio belanja barang dan jasa sebesar 0.047 maka setiap rasio belanja barang dan jasa dinaikkan 1 satuan, kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio ketergantungan keuangan juga akan naik sebesar 0.047 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 4) Nilai rasio belanja modal sebesar -0.055 maka setiap rasio belanja modal dinaikkan 1 satuan, kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio ketergantungan keuangan akan turun sebesar 0.055 (naik -0.055) dengan asumsi variabel lain tetap.
- 5) Nilai rasio PAD sebesar -0.922, maka setiap rasio PAD dinaikkan 1 satuan, kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio ketergantungan keuangan akan turun sebesar 0.922 (naik -0.922) dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 2
Hasil Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.324	4	.081	138.439	.000 ^b
Residual	.095	163	.001		
Total	.420	167			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan: Rasio Ketergantungan
b. Predictors: (Constant), Rasio PAD, Rasio Belanja Pegawai, Rasio Belanja Modal, Rasio Belanja Barang dan Jasa

Sumber : Hasil Analisa Regresi,

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai fhitung sebesar 138.439 hasil fhitung tersebut dikonsultasikan dengan ftabel dengan taraf signifikansi 5% (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa fhitung > ftabel (138.439 > 2.66) dan taraf signifikansi nilai Sig. sebesar 0.000 < 0.05 lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel variabel rasio belanja pegawai, rasio belanja barang dan jasa, rasio belanja modal dan rasio PAD secara simultan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio ketergantungan keuangan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fitriyah (2019) yang menemukan bahwa belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja. Penelitian Anggi *et al* (2023) juga memberikan hasil yang sama belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja barang & jasa, dan belanja modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja.

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Standar	Keterangan
H1	-1.663	< 1.97453	0.098	> 0.05	Tidak berpengaruh
H2	.939	< 1.97453	0.349	> 0.05	Tidak berpengaruh
H3	-1.074	< 1.97453	0.284	> 0.05	Tidak berpengaruh
H4	-13.774	< 1.97453	0.000	< 0.05	Berpengaruh

Sumber : Hasil Analisa Regresi, Lampiran 11.s

- 1) Pengaruh rasio belanja pegawai terhadap kinerja keuangan
Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah rasio belanja pegawai berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -1.663. Hal ini menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ 1.97453 dan nilai signifikansi sebesar 0.0998 > 0.05, maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
- 2) Pengaruh rasio belanja barang dan jasa terhadap kinerja keuangan
Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah rasio belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0.939. Hal ini menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ 1.97453 dan nilai signifikansi sebesar 0.349 > 0.05, maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa belanja barang dan jasa secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
- 3) Pengaruh rasio belanja modal terhadap kinerja keuangan
Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah rasio belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -1.074. Hal ini menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ 1.97453 dan nilai signifikansi sebesar 0.284 > 0.05 maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa belanja modal secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
- 4) Pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan
Hipotesis 4 yang diajukan dalam penelitian ini adalah rasio PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -13.774. Hal ini menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ 1.97453 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio PAD secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Keterangan
1	.879 ^a	.773	.767	Berpengaruh sebesar 76.7%

Sumber : Hasil Analisa Regresi,

Pada tabel 4.13 diperoleh angka R^2 (R Square) sebesar 0,767 atau 76.7%. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (rasio belanja pegawai, rasio belanja barang dan jasa, rasio belanja modal dan rasio PAD) terhadap

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

variabel dependen (kinerja keuangan yang diproksikan dengan ketergantungan keuangan) sebesar 76.7%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (rasio belanja pegawai, rasio belanja barang dan jasa, rasio belanja modal dan rasio PAD) mampu menjelaskan sebesar 76.7% variasi variabel dependen kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan sisanya sebesar 23,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Rasio belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan hasil pengujian yang tersaji pada tabel 3 menunjukkan rasio belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Rasio belanja pegawai menggambarkan seberapa besar proporsi anggaran daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan, kompensasi kepada pegawai di suatu daerah. Jika dilihat dalam data nilai rasio belanja pegawai di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, rata-rata proporsi belanja pegawai mencapai 39.70% dari total realisasi belanja daerah.

Penelitian Khrisnadewi & Praptiestrin (2022) menyimpulkan hasil yang sama bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda seperti Aulia & Sari (2023), Fitriyah (2019) dan Putri (2014).

Rasio belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan hasil pengujian yang tersaji pada tabel 3 menunjukkan rasio belanja barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Rasio belanja barang dan jasa menunjukkan seberapa besar proporsi anggaran daerah yang dialokasikan untuk belanja barang dan jasa yang meliputi pembelian barang dan jasa yang habis pakai atau tidak habis pakai dalam jangka waktu kurang dari satu tahun di suatu daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh rata-rata rasio belanja barang dan jasa Kabupten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 26.60%, yang menunjukkan proporsi realisasi anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa dari total anggaran belanja daerah. Sesuai dengan hasil uji t, bahwa tidak terdapat pengaruh rasio belanja barang dan jasa terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan Dyna *et al* (2022) dan Rohmah *et al* (2021) yang menunjukkan belanja barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Rasio belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan hasil pengujian yang tersaji pada tabel 3 menunjukkan rasio belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Rasio belanja modal menunjukkan proporsi anggaran daerah yang dialokasikan untuk investasi atau pembangunan fisik seperti pembelian aset tetap seperti bangunan, pembangunan infrastruktur, pembelian peralatan dan lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan data yang diperoleh rata-rata rasio modal Kabupten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 13.51%, yang menunjukkan sebagian besar anggaran dipergunakan belanja selain belanja modal seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

Rasio PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 3 menunjukkan rasio PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin besar rasio PAD akan semakin tinggi kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Heryanti *et al* (2019) yang menunjukkan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Begitu juga dengan peneliti lainnya, seperti Maulina *et al* (2021), Putri & Amanah (2020) dan Febriyanti (2022) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Rasio PAD merupakan perbandingan antara pendapatan yang dihasilkan sendiri oleh daerah terhadap total pendapatan daerah. Rasio PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data statistik deskriptif, rata-rata rasio PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebesar 19.59%. Artinya hampir sebagian besar daerah tersebut, masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk meningkatkan realisasi PAD, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan potensi penerimaan di daerahnya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD diantaranya dengan peningkatan efisiensi pengelolaan pajak, perluasan basis pajak, optimalisasi pengelolaan asset daerah, pengembangan ekonomi local dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum hasil penelitian ini menginformasikan bahwa rasio belanja pegawai, rasio belanja barang dan jasa, rasio belanja modal dan rasio PAD secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan rasio ketergantungan keuangan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sumbangan pengaruhnya sebesar 76.7% sedangkan 23.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal) mungkin tidak menjadi faktor utama dalam menentukan kinerja keuangan daerah dalam konteks penelitian ini. Hal ini bisa jadi karena faktor-faktor lain yang tidak terukur dalam penelitian ini, seperti kualitas belanja, efektivitas program, atau kondisi ekonomi makro, memiliki pengaruh yang lebih besar.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan lebih fokus pada peningkatan PAD. Pemerintah daerah perlu lebih fokus pada upaya meningkatkan PAD agar tidak terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga perlu evaluasi kembali alokasi anggaran. Meskipun belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal penting, namun perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah, seperti kualitas tata kelola pemerintahan, tingkat korupsi, dan kondisi geografis.

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F., & Ammy, B. (2021). Determinant Model of District/City Government Financial Performance in Sumatera Utara Province. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 1(2), 171–180. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i2.73>
- Anggi, Thoyib, M., & Fithri, E. J. (2022). Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang Dan Jasa, Dan Belanja Modal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Journal Transformation of Mandalika.*, 2(3), 5–11. <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/issue/archive>
- Anis Fitriyah. (2019). *Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.*
- Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 291–296. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1295>
- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745>
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164–174. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>
- Bilqis Husnun Karina, & Priyono Nuwun. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Jurnal Economina*, 2, 612–621. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/340>
- Chepkorir, M., Langat, P., & Rugut, W. (2021). Relationship Between Budgetary Monitoring and Financial Performance of County Government of Kericho, Kenya. *East African Journal of Business and Economics*, 4(1), 76–84. <https://doi.org/10.37284/eajbe.4.1.497>
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1150>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3 (1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>
- Istiatin & Sudarwati. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Surakarta: Universitas Islam Batik Surakarta

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

- Jayanti, F.D. & Sumardjo, M. (2021). Determinants of Government Characteristics and Audit Findings on Local Government Financial Performance. *Information Management and Business Review* (ISSN 2220-3796), 13(2), 7–15.
- Khrisnadewi, A., & Praptiestrini. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013 s/d 2016). *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 4(1), 35–43. www.djpk.depkeu.go.id
- Nauw, E.T. & Riharjo, I.B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 10, Nomor 6, Juni 2021, 1-17.
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 303–318. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985>
- Permatasari, D. A., & Trisnarningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(2), 192–209. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Priyono, N., Fatimah, A., & Nurcahya, Y. (2020). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 212–225. <https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2202>
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–20.
- Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jesya*, 6(2), 2068–2082. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230>
- Ramahdani, A. F., & Trisnarningsih, S. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 301–310. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.3924>
- Rohma Dyna, D., Masnila, N., & Wahyudi, R. (2023). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Dan Belanja Tak Terduga Terhadap Penyerapan Anggaran Pada

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

- Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(2), 2023.
- Rohmah, N., Wisdaningrum, O., & Iswahyudi, M. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan serta Belanja Barang dan Jasa Terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Desa. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 1(1), 88–108.
<https://doi.org/10.30762/almuhasib.v1i1.66>
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Sudariana, & Yoedani. (2022). Analisis Statistik Regresi Linier Berganda. *Seniman Transaction*, 2(2), 1–11.
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 85. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p04>
- Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 30–37.
<https://doi.org/10.15294/aaj.v9i1.22483>